

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori yang secara komprehensif tentang pustaka dan acuan yang mendukung penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan di provinsi Papua tahun 2015-2021.

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1 Teori *Human Capital*

Teori *Human Capital* merupakan konsep yang menganggap bahwa manusia adalah bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya. *Human Capital* berperan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menghasilkan layanan profesional, dan memberi solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pekerja perusahaan.

Menurut Todaro dan Smith (2015) mengatakan bahwa konsep dari sebuah *human capital* dapat dilihat melalui seseorang yang melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi dimasa yang akan datang.

2.2.2 Komponen pendekatan *Human Capital*

Menurut Barrett (2017), Pendekatan *human capital* merupakan suatu perspektif dalam manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya menganggap karyawan sebagai modal berharga atau aset yang dapat meningkatkan kinerja dan nilai organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa investasi dalam pengembangan,

pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

1. Komponen utama pendekatan human capital meliputi:

Rekrutmen dan Seleksi: Proses untuk menarik dan memilih individu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini melibatkan pencarian kandidat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan.

2. Pelatihan dan Pengembangan: Upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini dapat berupa program formal, seminar, mentoring, atau pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning.

3. Pengelolaan Kinerja: Proses untuk mengukur, mengelola, dan meningkatkan kinerja karyawan. Ini melibatkan penetapan tujuan, umpan balik reguler, evaluasi kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir.

4. Kompensasi dan Manfaat: Sistem penggajian dan tunjangan yang adil dan kompetitif untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ini meliputi gaji, tunjangan, bonus, insentif, asuransi, pensiun, dan program kesejahteraan lainnya.

5. Budaya Organisasi: Nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang membentuk lingkungan kerja dan cara kerja di organisasi. Budaya yang positif dan inklusif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan.

6. Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi: Mengakui pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Organisasi yang

memfasilitasi fleksibilitas waktu kerja, cuti, dan dukungan untuk kebutuhan pribadi karyawan cenderung memiliki tingkat kepuasan dan retensi yang lebih tinggi.

2.2.3 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup dalam produksi. Pentingnya rentang hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang adalah hal yang berharga dan fakta bahwa ada yang berbeda. Faktor yang secara tidak langsung berhubungan dengan harapan hidup, seperti nutrisi yang tepat dan kesehatan yang baik. Harapan hidup saat lahir (UHH) adalah perkiraan waktu rata-rata (dalam tahun) bahwa seseorang dapat hidup dalam hidupnya. perhitungan umur Harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect* estimasi). Data Anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH) digunakan. Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum (Sensus, 2010). Berdasarkan Teori Hendrik L. Blum Notoatmodjo (2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

2. Dimensi pengetahuan

Dimensi diwakili oleh indikator lama sekolah yang diharapkan (HLS) dan rata-rata sekolah lama (RLS), yang mencerminkan keterampilan masyarakat. Akses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas, sangat dibutuhkan produktif dalam kehidupan masyarakat modern. Rata-rata tahun sekolah menggambarkan jumlah modal manusia berdasarkan wilayah. Perkiraan lama sekolah adalah perkiraan lama sekolah (dalam tahun). Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama (BPS Papua, 2021).

HLS dihitung berdasarkan jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas agar sesuai dengan referensi Usia dalam program wajib belajar yang diumumkan oleh pemerintah. Sementara itu, RLS adalah rata-rata waktu yang dihabiskan residen dalam perawatan Pendidikan formal. Cakupan populasi untuk menghitung RLS adalah populasi 25 tahun ke atas dengan asumsi proses pendidikan orang tersebut berakhir sebelum usia 25 tahun. Perhitungan RLS berdasarkan jumlah penduduk Orang berusia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan dari UNDP.

3. Dimensi Hidup Layak

Indikator pengeluaran mencerminkan dimensi taraf hidup yang layak disesuaikan secara riil per kapita dan tahun. Indikator ini mencerminkan kemampuan orang untuk menghabiskan uang mereka Menghabiskan uang dalam bentuk barang dan jasa (BPS, 2020).

Untuk mengukur standar hidup yang layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal sebagai PDB riil yang disesuaikan. Untuk Perhitungan IPM sub-negara bagian (provinsi atau kabupaten/kota) tidak menggunakan PDRB per kapita, karena produk domestik bruto per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil penduduk yang penting bagi IPM. BPS menggunakan data tersebut untuk mengukur daya beli penduduk di provinsi-provinsi Indonesia Konsumsi rata-rata 27 barang terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan distandarkan sehingga dapat dibandingkan antar daerah dan waktu yang berbeda disesuaikan dengan indeks PPP (*purchasing power parity*).

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menurut status capaiannya yaitu:

1. Sangat tinggi: Indeks Pembangunan Manusia ≥ 80
2. Tinggi: $70 \leq$ Indeks Pembangunan Manusia < 80
3. Sedang: $60 \leq$ Indeks Pembangunan Manusia < 70
4. Rendah: Indeks Pembangunan Manusia < 60

2.2 Tingkat Pengangguran

2.2.1 Teori Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

menggambarkan proporsi angkatan kerja yang menganggur dan secara aktif mencari dan bersedia bekerja. Tingkat pengangguran didefinisikan secara matematis sebagai hasil bagi jumlah pengangguran untuk negara atau kelompok kerja. Penyebut atau pembagi dalam hal ini para pekerja, bukan populasi. Poin ini harus ditekankan karena istilah angkatan kerja dan publik tidak selalu memahami karya tersebut (BPS Papua, 2021).

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang, kehilangan suatu pekerjaan dapat menurunkan standar kehidupan. Tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2006).

Jika diverifikasi berdasarkan pada kelompok umur, nilai TPT tertinggi terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun dengan nilai TPT 9,91. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kerja berada dalam kelompok usia ini, tidak aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan masih berusaha mendapatkan pekerjaan atau mempersiapkan perusahaan, sehingga nilai TPT relatif tinggi. Sedangkan kelompok usia 50-64 tahun memiliki TPT di bawahnya dua persen. Artinya, penduduk kelompok umur ini aktif secara ekonomi dalam Pasar tenaga kerja. Berdasarkan Teori klasik menjelaskan pandangan tentang pengangguran dapat dicegah dengan mekanisme penawaran dan harga pasar gratis untuk memastikan perlambatan generasi permintaan Semua

Penawaran. Menurut konsep klasik, pengangguran terjadi karena kesalahan alokasi sementara sumber daya kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Dalam teori klasik, ketika terlalu banyak energi bekerja, upah turun dan itu Penganggur terbuka, terdiri dari (BPS, 2021):

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2.2.2 Pengukuran Tingkat pengangguran

Mengukur tingkat pengangguran di daerah diperoleh melalui dua metode:

1. Metode tenaga kerja

Dapat menghitung ukuran tingkat pengangguran berdasarkan persentase dan rasio jumlah antara jumlah orang pengangguran dan tenaga kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2. Metode pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
 - a. orang yang dipekerjakan oleh pekerjaan sepanjang jam kerja atau jam kerja mencapai 35 jam.

- b. Orang dengan pekerjaan yang tidak mencukupi bekerja, tetapi tidak digunakan dalam semua atau jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya.

Ada beberapa definisi mengenai kemiskinan, antara lain:

- a. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berkaitan dengan keadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu sekolah, tidak mampu baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan. tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan. Sederhananya, Bank Dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan yang diukur dengan tingkat kesejahteraan
- b. Menurut Niemietz (2011) menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar, pakaian, papan dan obat-obatan.

2.3.2 Pengukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk menetapkan seberapa banyak penduduk miskin atau persentase kemiskinan di suatu wilayah, dibutuhkan alat ukur atau pembatas antara miskin dan tidak miskin, garis kemiskinan (dalam rupiah) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Pengukuran kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Head Count Index* (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). (BPS,2021)

2.4 Distribusi Pendapatan

2.4.1 Definisi Distribusi Pendapatan

Ada beberapa definisi mengenai Distribusi pendapatan antara lain:

Menurut Rachman, *et al* (2020) distribusi pendapatan adalah "cara di mana pendapatan nasional dan kekayaan diperoleh dan didistribusikan di antara individu dan kelompok masyarakat". Ia juga memperkenalkan konsep "kurva Kuznets", yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan akan meningkat

seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada awalnya, tetapi kemudian menurun setelah negara mencapai tingkat pendapatan tertentu.

Menurut Stiglitz (2015) distribusi pendapatan adalah "cara di mana kekayaan, penghasilan, dan kesempatan didistribusikan di antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat". Ia juga mengkritik neoliberalisme dan mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

2.4.2 Ukuran Ketimpangan Distribusi

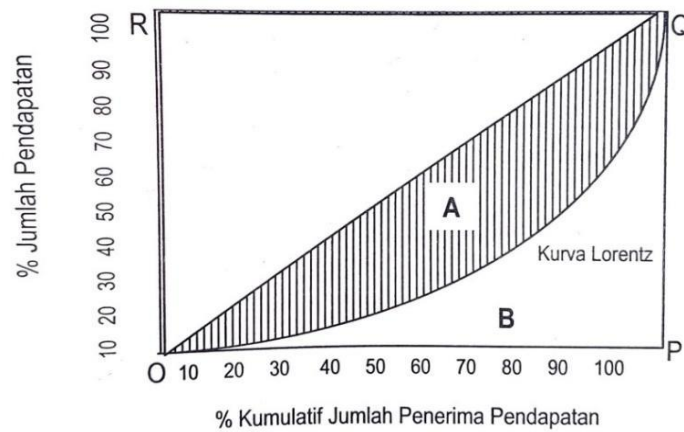
Secara umum, pengukuran ketimpangan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran normatif dan pengukuran objektif atau deskriptif (Bellu & Liberty, 2006).

Pendekatan normatif biasanya mengukur ketimpangan dari sudut pandang dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan bersifat normatif seperti etika, tingkat kepuasan, kesejahteraan, dan lainnya. kata lain, pendekatan normatif dapat menetapkan apakah dengan ketimpangan baik atau buruk bagi individu, seberapa banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya yaitu Indeks Gini. Indeks ini mengukur derajat ketimpangan dalam distribusi pendapatan di antara seluruh penduduk. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan kesetaraan

absolut dan 1 mengindikasikan ketimpangan absolut. Semakin tinggi nilai indeks Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan.

1. Koefisien Gini

Koefisien gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Koefisien gini merupakan perbandingan antara garis pemerataan dengan Kurva Lorenz pada Gambar 2.1 Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (Perkins, *et al*, 2001). Kurva Lorenz memberikan gambaran yang lebih jelas dibandingkan kurva lainnya. Ini disebabkan sumbu horizontal dan vertikalnya tidak menggunakan logaritma, tetapi nilai hitung biasa sehingga tidak terjadi pengerutan, baik pada tingkat pendapatan rendah maupun tingkat pendapatan tinggi. Berikut bentuk kurva Lorenz antara lain:



Sumber: Maipita, Indra (2014).

Gambar 2.1

Bentuk Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut diketahui bahwa semakin tidak merata distribusi pendapatan maka kurva Lorenz akan semakin cekung (Todaro dan Smith, 2003).

Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang diarsir (A) dibagi dengan luas segitiga OPQ (B). Rasio ini dikenal dengan Koefisien Gini (*Gini concentration ratio*).

2.5 Hubungan antar variabel

2.5.1 Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap IPM suatu negara, pengangguran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita, dan akses terhadap sumber daya yang penting bagi pembangunan manusia. Pengangguran merupakan indikator output lapangan kerja yang menjelaskan proporsi tenaga kerja yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, tetapi pencarian kerja aktif atau persiapan untuk perusahaan, begitu tinggi. Pada saat yang sama, dari sudut pandang keuangan, para penganggur tidak memiliki pendapatan, sehingga konsumsi turun. Pengangguran yang tinggi semakin tidak efisiennya perekonomian daerah. Hal ini dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya dan berdampak negatif terhadap IPM (Todaro, 2012).

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memaksa masyarakat untuk bekerja pada pekerjaan yang tidak layak atau berbahaya, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi IPM karena pekerjaan yang tidak layak atau berbahaya dapat membatasi pengembangan sumber daya manusia dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

2.5.2 Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena kemiskinan dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya yang penting bagi pembangunan manusia, seperti pendapatan, pendidikan, dan layanan

kesehatan. Kemiskinan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan keluarganya, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya tersebut. IPM sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan manusia dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Indeks ini mencakup tiga indikator yaitu penghasilan per kapita, angka harapan hidup, dan tingkat pendidikan (BPS, 2020).

Berdasarkan definisi dan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara kemiskinan dan IPM. Jika tingkat kemiskinan tinggi, maka penghasilan per kapita masyarakat akan rendah, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan akan terbatas, dan angka harapan hidup juga dapat menurun. Sebaliknya, jika kemiskinan dapat dikurangi, maka penghasilan per kapita masyarakat dapat meningkat, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan, dan angka harapan hidup dapat meningkat. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan dapat membantu meningkatkan IPM.

2.5.3 Hubungan Distribusi Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi pembangunan manusia karena mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya yang penting bagi pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah mungkin tidak mampu mengakses layanan kesehatan atau pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan akhirnya

mempengaruhi IPM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan yang merata dapat membantu meningkatkan IPM, sementara distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk di Papua, sehingga IPM nya lebih rendah. Oleh karena itu, ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang berdampak pada IPM. Upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, seperti melalui kebijakan sosial, redistribusi pendapatan, dan program bantuan sosial dapat membantu meningkatkan IPM.

2.6 Studi Terkait

Penelitian mengenai tingkat pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan telah dilakukan sebelumnya. Handayani dan Woyanti (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto (PDRB), kemiskinan, pengangguran dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 35 Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2019 dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengangguran dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Mediasari & Soejoto (2017) juga melakukan penelitian yang sama yaitu untuk menganalisis pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Indonesia tahun 2010-2015 dengan menggunakan *Fixed Effect Model* diperoleh hasil bahwa variabel distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Adapun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yunus dan Murbanto, 2023) menguji pengaruh Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saridewi, Primadana Wahed (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro periode 2002 hingga 2019 memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro, Pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan kemiskinan dapat secara signifikan mempengaruhi IPM di Kabupaten Bojonegoro.

Nurhaini (2016) melakukan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

wilayah subosukawonosraten menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal yang sama juga terdapat pada variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM dan variabel pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Syafendi (2022) dalam penelitiannya mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh dengan pendekatan *Fixed Effect Model* ia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.

Dzaki Furqoni (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di provinsi Sumatera Utara 2013-2017 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Bahriyah dan Primandhana (2022) dalam penelitiannya mengenai Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Kabupaten Gresik tahun 2011-2020 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM sedangkan untuk variabel Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Arifin (2017) mengenai Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap IPM, tidak adanya pengaruh secara signifikan pengeluaran pemerintah terhadap IPM, dan tidak adanya pengaruh secara signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM.

